BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya pembangunan ekonomi di zaman sekarang, banyak masyarakat yang melakukan cara untuk meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara agar semuanya dapat terpenuhi dengan baik. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh elemen masyarakat, maka harus dilakukan pembangunan pada seluruh sektor bidang tersebut yang menunjang. Pelaksanaan kegiatan pembangunan itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi oleh semua pihak yang bersangkutan tanpa terkecuali pihak swasta sebagai salah satu pilar kekuatan. Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah senantiasa dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mengemban kewajiban ini, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuknya baik yang berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Disisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dari hal tersebut masyarakat telah dijamin oleh negara sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 33. Akan tetapi, pada perekonomian negara Indonesia yang masih terpuruk akibat krisis moneter yang terjadi pada

tahun 1998 yang berakibat sampai sekarang. Hal ini mempunyai beberapa pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Menurut konsep negara kesejahteraan, tujuan negara adalah untuk kesejahteraan umum. Negara dipandang hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan bersama kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Selain konsep negara berdasar atas hukum (biasa disebut negara hukum), juga dikenal konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), yakni suatu konsep yang menempatkan peran negara dalam setiap aspek kehidupan rakyatnya demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga - lembaga keuangan non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran angsuran (kredit), hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*).

Mengenai peningkatan kebutuhan ini, masyarakat banyak melakukan terobosan tertentu yang dilakukan. Seperti halnya melakukan perjanjian dengan perorangan atau perusahaan yang menyediakan kebutuhan masyarakat tersebut. Sejalan dengan semakin berkembangnya kegiatan pembangunan nasional disemua sektor. Maka peran dari pihak swasta semakin meningkat

dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Keadaan ini semakin baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menuntut lebih aktifnya kegiatan masyarakat berusaha. Dalam perkembangan pembangunan ini yang mempunyai dampak yang signifikan yaitu pada sektor perdagangan kendaran bermotor. Ini ditinjau dari berbagai upaya masyarakat untuk meningkatkan perdagangan kendaraan bermotor, yang pada dasarnya menciptakan lebih banyak varian sistem pemasaran barang yang telah ada.

Menjamurnya lembaga pembiayaan di tengah - tengah masyarakat setidaknya diawali sejak tahun mulai bangkitnya ekonomi indonesia, diantara beberapa jenis pembiayaan yang menunjukkan perkembangan pesat adalah pembiayaan terhadap pengadaan kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda dua. Dari sini pihak produsen dapat melihat perkembangan perekonomian masyarakat sebagai peluang yang baik untuk memasarkan produknya yakni kendaraan bermotor. Berdasarkan data Bapepam tercatat pada tahun 2007 saja jumlah perusahaan pembiayaan telah mencapai angka “217”, dan kemudian ditahun 2008 hingga tahun 2010 mengalami penurunan menjadi “192” perusahaan sejalan dengan diberlakukan pengetatan aturan bagi Lembaga Pembiayaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 dan pada tahun 2011 mulai kembali menunjukkan

peningkatan menjadi “195” perusahaan seiring dengan diterbitkan beberapa izin usaha baru bagi perusahaan pembiayaan.¹

Sementara dilapangan kendaraan bermotor sangat penting untuk menunjang aktifitas kegiatan masyarakat tersebut untuk mendukung kecepatan dalam mobilitasnya yang membuat fungsi kendaraan bermotor menjadi kebutuhan yang sangat vital apalagi kebutuhan masyarakat akan mobilitas rutin belum seluruhnya dapat ditanggulangi oleh jasa pelayanan transportasi publik yang murah dan memadai.

Banyaknya kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan, baik dari segi bunga maupun jangka waktu kredit, membuat perusahaan pembiayaan menjadi primadona bagi segmen masyarakat golongan menengah kebawah, meskipun harus diakui untuk segmen masyarakat menengah keatas peran lembaga perbankan masih tetap tidak tergoyahkan. Konsumen tidak perlu menyediakan dana besar dan jaminan yang bernilai tinggi bisa memperoleh sebuah kendaraan bermotor dan barang-barang lainnya yang dibutuhkan, cukup dengan menyediakan 10 sampai 20% saja dari harga barang sebagai *down payment* (DP), karena jaminan atas utang dalam perjanjian kredit yang dibuat dijamin dengan kendaraan yang dibelinya dengan menggunakan Jaminan Fidusia, sehingga pihak kreditor memiliki kenyamanan dalam mengucurkan dananya dan konsumen pun menjadi sangat

¹ *Resilience Of The Domestic Economy Through Sustainable Growth Of The Finance Companies*” Laporan Tahunan Industri Perusahaan Pembiayaan Annual Report Finance Companies, Tahun 2011, Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hlm. 3 sebagaimana dikutip dalam buku D.Y. Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, CV. Mandar Maju, 2015, hlm. 2

diuntungkan, karena kendaraan tersebut tetap dapat dipergunakan dengan leluasa.

Dalam dunia usaha faktor modal (*capital*) merupakan salah satu komponen yang sangat penting, karena tanpa adanya modal aktivitas usaha tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Lembaga yang secara konvensional menyediakan modal adalah bank melalui pemberian kredit kepada masyarakat. Dalam setiap penyaluran dana (pemberian kredit), bank selalu membutuhkan jaminan (*collateral*) yang memadai,² dengan sistem pembebanan dan seleksi kelayakan yang sangat rumit dan rigid, sehingga tidak semua kebutuhan masyarakat menyangkut permodalan dapat ditanggulangi oleh bank. Bagi golongan masyarakat tertentu akan sulit untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank karena tidak mampu memenuhi kriteria jaminan yang di isyaratkan. Kemunculan lembaga pembiayaan dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat yang mampu menjangkau hingga ke lapisan masyarakat menengah ke bawah melalui mekanisme pembebanan jaminan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan sistem jaminan yang digunakan oleh lembaga perbankan,³ dengan cara melakukan perjanjian satu dengan lainnya.

Makna dari jual beli itu ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, ini dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 1457. Jual beli itu dianggap telah terjadi apabila

² Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm: 111

³ Munir Fuady, *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm: 3

kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya. Namun suatu perjanjian apabila tidak terpenuhi syarat kesepakatan dan kecakapan si pembuat perjanjian berakibat perjanjian itu dapat dibatalkan.

Di Indonesia ini sendiri sistem penjualan yang paling marak dalam perdagangan sekarang yakni perdagangan kendaraan bermotor melalui sewa guna usaha, jual beli dengan angsuran yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yang telah disepakati bersama. Ini dilakukan dengan cara pembeli mengangsur biaya tertentu dan uang angsuran dianggap sebagai sewa sampai akhirnya setelah pelunasan, barulah dianggap uang angsuran itu sebagai hadiah pembelian kendaraan bermotor yang dibeli sewa. Perjanjian sewa guna usaha ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat kita lihat dalam praktek sehari-hari, banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekunder.

Namun pada dasarnya perjanjian sewa guna usaha ini belum diatur dengan baik, sehingga dapat memunculkan beberapa masalah yang timbul berkaitan dengan lembaga sewa guna usaha tersebut. Dengan keadaan yang demikian ini lembaga sewa guna usaha dirasa kurang memberikan suatu kepastian hukum. Oleh sebab itu perlu diadakan suatu perundang – undang yang menjelaskan bahwa ada kekuatan hukum tetap bagi para pelakunya. Perjanjian sewa guna usaha ini mempunyai manfaat yang ganda, diantaranya memberi keuntungan untuk penjual kendaraan bermotor tersebut terjual dengan banyak dan juga memberikan manfaat bagi pembeli kendaraan

tersebut bahwa pembeli dapat memperoleh kendaraan itu segera walaupun mereka belum mempunyai uang yang cukup secara kontan, serta dalam kehidupan kendaraan bermotor yang dirasa dapat mendukung segala aktifitas manusia itu sendiri. Secara umum, dari perjanjian ini masih sederhana, yakni hanya memuat ketentuan pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor ini sendiri yang merupakan realisasi dari perjanjian. Dapat dijelaskan pula bahwa kesepakatan yang terjadi di dealer adalah suatu perikatan yang mengikat antara kedua belah pihak.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya yang mengenai hukum perjanjian menganut “sistem terbuka atau open system”, yang berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁵ Sendi ini terkenal sebagai Asas Kebebasan Berkontrak yang terdapat pada Pasal 1338 KUH perdata, yang menyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*”

Seperti yang kita ketahui sewa beli merupakan suatu macam jual – beli, setidak – tidaknya ia lebih mendekati jual – beli dari pada sewa – menyewa, meskipun ia merupakan suatu campuran dari keduanya dan diberikan judul sewa – menyewa. Dalam *Hire-purchase Act 1965* ia dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian sewa – menyewa dengan hak opsi

⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 120

⁵ Amin Widjaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, *Aspek Yuridis dalam Leasing*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 3

dari si penyewa untuk membeli barang yang disewanya.⁶ Pada perjanjian sewa – menyewa ini yang telah berkembang di kalangan para pengusaha tidak lain dinamakan leasing.

Hak opsi (*finance lease*) sering juga disebut *full pay out lease* atau *capital lease* merupakan jenis sewa guna usaha yang lebih sering diterapkan di dalam praktek. Sedangkan tanpa hak opsi (*operating lease*) ini disebut juga *service lease* merupakan jenis sewa guna usaha dimana lessor hanya menyediakan barang modal untuk disewa oleh lease dengan tanpa adanya hak opsi di akhir masa kontrak dalam perjanjian sewa guna. Hak opsi adalah hak untuk membeli objek sewa guna usaha setela berakhirnya perjanjian berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan No. 122, No. 30 Tahun 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hak opsi (pilih) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang modal bersangkutan, atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan kegiatannya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Menurut pasal 1 angka (5) Keppres No. 61

⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 52.

Tahun 1988 yang dimaksud dengan perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Adapun dalam Pasal 1 angka (9) Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan ditentukan, bahwa perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Perjanjian sewa guna yang diberikan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi. Risiko yang umumnya terjadi yaitu kemacetan dalam pelunasan pembayaran kendaraan, karena uang untuk pembayaran itu sangat berpengaruh pada lembaga tersebut untuk memberikan bantuan kepada nasabah lain. Perusahaan juga harus menerapkan sistem jaminan yang baik agar kredit macet yang terjadi pada konsumen dapat diantisipasi dengan tepat. Persoalan kredit macet atau wanprestasi merupakan problem utama dalam dunia usaha, namun potensi terjadinya kerugian yang diakibatkan adanya kredit macet harus sudah mampu dipikirkan jauh-jauh sebelumnya dengan melakukan antisipasi yang baik oleh perusahaan pembiayaan agar tidak mengganggu stabilitas dan kesehatan perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

Untuk memperkecil risiko serta kepastian bagi pihak lembaga pembiayaan terhadap sewa guna yang dikeluarkan, maka lembaga pembiayaan harus melakukan tindakan preventif dengan cara menahan BPKB kendaraan yang bersangkutan sebagai jaminan, karena dengan adanya jaminan maka akan memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga pembiayaan untuk mendapatkan pelunasan dari jaminan tersebut apabila nasabah tidak memenuhi prestasinya dalam melunasi pembayaran kendaraannya. Namun ada beberapa cara lain untuk memperkecil risikonya, yaitu seperti melihat riwayat keluarganya dan mengecek semua data diri dari nasabah untuk memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh lembaga pembiayaan.

Adanya keleluasan dari pihak yang berkepentingan untuk memberlakukan hukum perjanjian yang termuat dalam buku III KUH.Perdata, yang juga sebagai hukum pelengkap dan ditambah pula dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH.Perdata. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan “*apa*” dan dengan “*siapa*” perjanjian itu diadakan. Asas ini memungkinkan para pihak dalam prakteknya untuk mengadakan perjanjian yang sama sekali tidak terdapat dalam KUH.Perdata maupun KUHD, dengan demikian oleh undang-undang diperbolehkan untuk membuat perjanjian yang harus dapat berlaku bagi para pihak yang membuatnya.⁷

⁷J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lain Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 19

Apabila dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak ditentukan, hal-hal tunduk pada ketentuan undang-undang. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan persetujuan tertentu dari kedua belah pihak atau berdasarkan alasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa perjanjian pembiayaan konsumen (*Customer Finance*) tunduk pada ketentuan-ketentuan umum untuk hukum perjanjian yang terdapat dalam buku III KUH.Perdata sehingga apabila terjadi perselisihan antara para pihak ketentuan-ketentuan tersebutlah yang dapat ditentukan sebagai pedoman dalam penyelesaian.

Dengan dilatar belakangi uraian tersebut di atas maka penulis terdorong untuk lebih mendalami persoalan masalah pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha serta akibat hukumnya dengan melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA MELALUI PERUSAHAAN LEASING (STUDI KASUS DI SUZUKI FINANCE CABANG KUDUS)**”

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan dari latar belakang tersebut diatas, maka dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini, penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha antara lesse dengan lessor ?

2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh lessor dalam pelaksanaan perjanjian sewa guna ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak lessor apabila lesse tidak memenuhi prestasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun memperhatikan penelitian yang hendak dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha antara lesse dengan lessor.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh lessor dalam pelaksanaan perjanjian sewa guna.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak lessor apabila lesse tidak memenuhi prestasi.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi dunia akademik mengenai pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha melalui perusahaan leasing di Suzuki Finance

b. Untuk memenuhi tugas penulisan hukum sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui hak – hak dan kewajiban serta akibat hukumnya dalam melakukan perjanjian sewa guna usaha, khususnya dalam melakukan perjanjian sewa guna usaha melalui perusahaan leasing di Suzuki Finance.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian – kajian berikutnya.

c. Bagi Perusahaan Suzuki Finance

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Suzuki Finance dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam hal pelayanan kepada nasabahnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 2

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian dengan metode yuridis empiris adalah penelitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya terhadap masyarakat. Penelitian yuridis empiris/sosiologis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan dengan memadukan peneliti yang dilakukan di lapangan yang merupakan data primer

2. Jenis Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 2 jenis data yaitu: data primer adalah data-data, keterangan atau informasi yang didapatkan secara langsung melalui penelitian dilapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara. Wawancara merupakan cara yang dapat digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,⁹ data sekunder . Dan sumber datanya meliputi data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2001 , hlm. 95

- b. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c. Undang_Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
 - d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia
 - e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - f. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
 - g. Keppres Nomor 39 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
 - h. Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer,¹⁰ yang berupa laporan hasil penelitian, pendapat, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha.
- 3) Bahan Hukum Tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum yaitu *Black's law dictionary*, kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 12

3. Metode Pengumpulan Data

Setiap penelitian memerlukan data sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber yang tepat, sehingga data yang terkumpul akan relevan dengan masalah yang diselidiki sehingga tidak menimbulkan kekeliruan bias (*biased*) dalam penyusunan dan kesimpulan.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data-data, keterangan atau informasi yang didapatkan secara langsung melalui penelitian dilapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara. Wawancara merupakan cara yang dapat digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dengan mewawancarai orang yang bekerja di Suzuki Finance cabang Kudus bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha.

Data Sekunder adalah data-data yang didapat dari literatur atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder disebut juga sebagai study kepustakaan. Study kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.¹¹

¹¹ M Ali, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm.

4. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang di bahas. Setelah analisis data selesai, maka disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.¹²

5. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian adalah di Kantor Suzuki Finance Cabang Kudus yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan fasilitas sewa guna usaha.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun berdasarkan urutan langkah-langkah yang ditempuh dalam rangkaian kegiatan penelitian. Penulisan ini akan diuraikan ke dalam empat bab yaitu Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV. Dari keempat bab itu kemudian diuraikan lagi menjadi sub-sub bab yang diperlukan, sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

¹² H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 1998, hlm. 37

BAB II : Kajian Pustaka, akan diuraikan tentang sub bab pertama merupakan kajian tentang Perjanjian yang meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas hukum perjanjian, unsur perjanjian, subyek dan obyek perjanjian, jenis-jenis perjanjian, prestasi, wanprestasi, dan berakhirnya perjanjian. Sub bab kedua mengenai tinjauan umum tentang pengertian sewa guna usaha, dasar hukum perjanjian sewa guna usaha, para pihak dalam perjanjian sewa guna usaha, dan Pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha (Leasing) dalam Hukum Islam

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, akan diuraikan mengenai hasil penelitian tentang tinjauan umum tentang PT Suzuki Finance Indonesia, Produk dan Layanan, Pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha, Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lessor dalam pelaksanaan perjanjian sewa guna, Upaya yang dilakukan pihak Lessor apabila Lessee tidak memenuhi prestasi.

BAB IV : Penutup yaitu berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dan saran yang dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulisan, yang ditujukan kepada para pihak yang terkait dengan penelitian.